

Strategi Manajemen Perubahan dalam Inovasi *Open Data* untuk Keterbukaan Informasi Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Bandung

Ai Nunung¹, Dian Candra Fatihah²

^{1,2} Politeknik Piksi Ganesha, Jawa Barat, Indonesia

e-mail: hjan0967@yahoo.co.id¹, Diancandrafatihah@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengenai inovasi *Open Data dalam* proses mengadopsi yang merupakan hasil penelitian yang berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi. Kabupaten Bandung yang merupakan tempat riset untuk mengambil Unit analisis yang dijadikan percontohan di Indonesia dimana salah satunya adalah Kabupaten Bandung. Sejak tahun 2018, gagasan ini sudah di adopsi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Slogan kreatif Kabupaten Bandung menciptakan salah satu instrumen dimana dengan teknologi terintegrasi pengelolaan konsep kabupaten untuk memberikan komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Belum efektif nya sistem *inovasi Open Data* pada manajemen perubahan diperlukan sekali strategi dalam penelitian yang diangkat menjadi topik permasalahan. Sebagai panduan riset yang digunakan teori yang utama adalah model teori *force* (model *three Steps*) dari Lewin dimana dimensi ini pernah oleh Pugh sudah dimodifikasi dalam konteks strategi manajemen perubahan. Informasi masyarakat pada pelayanan Brown dan Osborne konteks dalam strategi manajemen perubahan beserta inovasi *Open Data*. Tiga langkah model dari *Three Steps* terdiri atas tahap *refreezing*, *moving*, dan *Unfreezing*. *Refreezing step* (penyerapan dan permanennya inovasi) yang merupakan dimensi perubahan struktur, *moving step* (tahap adopsi inovasi) yang merupakan proses implementasi inovasi dan dimensi komitmen organisasi serta *Unfreezing step* terdiri atas dimensi adaptasi dan introduksi. Sementara pelibatan pengguna, diseminasi informasi, kumpulan data, perubahan sikap dan organisasi. Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus dengan pendekatan kualitatif. *Open Data* merupakan suatu program yang merupakan riset yang menjadi objeknya, dalam rangka menerapkan kebijakan keterbukaan informasi masyarakat, yang dijadikan subjek didalam penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Informandi dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah pihak penyandang dana, komunitas *Open Data* yang merupakan pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sebagai informasi publik di internal serta pengelola *Open Data*. Kesimpulannya inovasi *Open Data* di dalam melaksanakan pekerjaan yang dijadikan alasan belum efektif di pemerintah Kabupaten Bandung, karena di dalam proses strategi manajemen perubahan dan inovasi data belum menerapkan sepenuhnya tiga tahapan didalam perubahan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan temuan dari riset ini ada beberapa temuan yang belum mengacu kepada: Pertama kuantitas dan kualitas kebutuhan dari masyarakat belum terpenuhi berdasarkan target, Kedua pelatihan internal yang dilakukan di dalam organisasi dan kegiatan diseminasi OD ternyata kekurangan dari pengadaan anggaran, Ketiga tidak jelas mekanisme serta tidak ada koordinasi dan Informasi kepada Masyarakat dalam lingkup pelayanan terutama struktur organisasi *Open Data* (OD) belum terintegrasi dengan baik. Keempat inovasi OD dilihat dari pendekatan teori lain yang berkaitan belum dilakukan riset-riset baik secara teoritis maupun pelatihan internal organisasi. Adapun saran praktis yang bisa di sampaikan adalah memperkuat komunikasi masyarakat dan memperkuat koordinasi.

Kata kunci: *Strategi Manajemen Perubahan, Inovasi, Inovasi Open data, Keterbukaan Informasi masyarakat*

Abstract

This research is about *Open Data* innovation in the process of adopting which is the result of research that is useful for providing information to the public in the context of information disclosure. Bandung Regency is the research place to take the unit of analysis that is used as a pilot in Indonesia, one of which is Bandung Regency. Since 2018. This idea has been adopted by the Bandung Regency Government. The creative slogan of Bandung Regency creates an instrument wherewith integrated technology the management of the district concept is to provide communication and information to the community. The ineffectiveness of the *Open Data* innovation system in change management requires a strategy in research that is raised as the topic of the problem. As a research guide, the main theory used is the *force* theory model (*three Steps* model) from Lewin where this dimension has been modified by Pugh in the context of change management strategies. Public information on Brown and Osborne's services in the context of change management strategies and *Open Data* innovation. The three-step model of the *Three Steps* consists of refreezing, moving, and *Unfreezing* stages. Refreezing step (absorption and permanent innovation) which is the dimension of structural change, *moving step* (innovation adoption stage) which is the innovation implementation process, and organizational commitment dimension and *Unfreezing* step consists of adaptation and introduction dimensions. Meanwhile, user involvement, information dissemination, data collection, attitude, and organizational change. This research uses a case study strategy with a qualitative approach. *Open Data* is a program that is a research object, to implement a public information disclosure policy, the subject of this research is the Department of Communication and Information of the Bandung Regency Government. The informants in this study who were used as respondents were the funders, the *Open Data* community which is a stakeholder, the Bandung Regency Government as internal public information, and the *Open Data* manager. In conclusion, *Open Data* innovation in carrying out the work that is used as an excuse has not been effective in the Bandung Regency government, because in the process of change management strategy and data innovation it has not fully implemented the three stages of change in providing information services to the public. Based on the findings of this research, several findings do not refer to First, the quantity and quality of the needs of the community have not been met based on the target, Second, the internal training carried out within the organization and OD dissemination activities turned out to be lacking in budget procurement, Third, the mechanism was not clear and there was no coordination and information to the public in the scope of services, especially the organizational structure of *Open Data* (OD) has not been well integrated. The four OD innovations seen from other related theoretical approaches have not been researched either theoretically or internally organizational training. The practical suggestions that can be conveyed are to strengthen community communication and strengthen coordination.

Keywords : *Change Management Strategy, Innovation, Open Data Innovation, Public Information Disclosure*

PENDAHULUAN

Strategi manajemen perubahan merupakan focus di dalam riset ini dalam inovasi pengelolaan *Open Data* (OD) dimana di sektor publik merupakan sebagai inovasi yang bisa dilihat sebagai isu yang sangat nyata di dalam administrasi Publik . Hal ini sejalan dan berkaitan dengan isu *One Data* dan *Big Data* sebagai gerakan *Open Government Indonesia* (OGI, 2015). *Big Data* merupakan sisi volume, kecepatan maupun ragamnya yang menurut badan publik mencapai titik kritis yang merupakan besarnya gambaran data yang dikuasai sehingga pengelolaannya membutuhkan teknologi baru.

Inovasi *Open Data* merupakan gerakan *Open Government Indonesia* (OGI) dari gerakan sebagai bagian yang sudah diperkenalkan kepada pemerintah daerah yang merupakan inovasi yang pada tahu 2012 dan pada bulan januari diluncurkan. OGI

merupakan sebuah gerakan itu sendiri yang sudah berkolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk supaya ada keterbukaan di dalam mewujudkan Pemerintah Indonesia dan supaya pelayanan publik ada perbaikan percepatan di Indonesia yang diamanahkan sebagaimana oleh UU no 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 mengenai pelayanan masyarakat, yang berlandaskan pada tiga pilar yaitu : inovasi, partisipasi dan transparansi (OGI , 2012). Melalui OGI masyarakat dan pemerintah bersama sama duduk untuk melaksanakan langkah langkah serta merumuskan dan kemudian penerapan OD dan menggagas dengan *pilot project* di tiga pemda yaitu Kota Bandung, kabupaten Bandung dan Kabupaten bandung Barat.

Pada saat ini Kabupaten Bandung belum berhasil atas diraihnya peringkat tertinggi dalam informasi masyarakat secara terbuka sungguh beralasan, ketua KI Jabar memberikan keterangan karena belum melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diamanahkan UU KIP dengan baik belum di tunaikan, hal ini sesuai dalam wawancara tanggal 05 oktober 2015. Diantaranya :

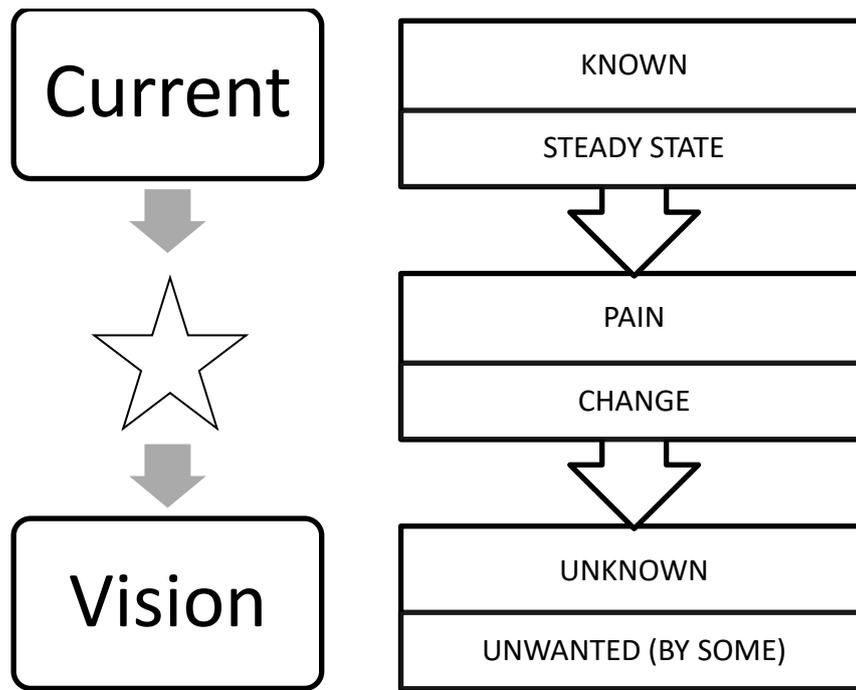
1. Sengketa masyarakat di Pemerintah Kabupaten Bandung , sebagian besar menyampaikan alasan karena permohonan informasi tidak di tanggapi.
2. Belum mengacu kepada pelayanan informasi publik yang berdasarkan peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2010 mengenai pelayanan informasi kepada masyarakat.
3. Informasi - informasi yang wajib tersedia yang harus diumumkan kepada masyarakat belum lengkap , dinataranya serta merta, informasi berkala yang harus tersedia setiap saat.
4. Melalui Perwal Kabupaten Bandung No. 1352 tahun 2014 , kegiatannya baru dilaksanakan pada tahun 2014 tentang Pembentukan PPID (ketentuan PP No. 61/2010 sementara paling lambat tahun 2011 seharusnya sudah dibentuk).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan latar belakang penelitian , bahwa rumusan dapat dijadikan permasalahan inovasi *Open Data* (OD) yang sangat berkaitan sekali di pemerintah Kabupaten Bandung adalah belum efektifnya di Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai kerangka Keterbukaan Informasi masyarakat terutama inovasi *Open Data* dalam strategi manajemen perubahan yang berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah mengapa strategi manajemen perubahan dalam inovasi *Open Data* untuk keterbukaan informasi masyarakat di pemerintah Kabupaten Bandung belum efektif?

Konsep Strategi Manajemen Perubahan dan Inovasi

Perubahan merupakan suatu keniscayaan , kepada siapapun dapat terjadi , dan apapun termasuk kepada organisai pemerintah. Integral sebagai bagian yang dikonseptualisasikan di dalam perubahan dan sangat terkait dari sebuah organisasi yang berkelanjutan dengan sehari-hari melaksanakan pekerjaan oleh anggota organisasi (Osborne & Brown, 2005: 229). Sementara inovasi adalah "*specific form of change, discontinuous change (a break with the past)*" (Osborne dan Brown, 2005: 5),

Definisi Manajemen perubahan sebagai "*the process of moving from the current state to the `vision` of the future and involves a degree of transition which may also result in `pain` for some or, more commonly, all* (Russell-Jones, 1995: 11). Proses ini digambarkan melalui skema berikut ini:



Gambar 1. SKema Perubahan

Gambar tersebut menunjukkan proses strategi manajemen perubahan yang merupakan kondisi saat ini yang merupakan pergerakan masa depan menuju kepada visi yang setidaknya diketahui dan kemungkinan tidak diinginkan (*unknown or unwanted*), dimana derajat transisi melibatkan seluruh pihak atau sebagian yang merupakan perilaku tidak nyaman (*pain*) (Russell-Jones, 1995: 11).

Pain tersebut ditandai dengan Masa transisi, Lewin mengemukakan apa yang senada dalam *Three-step Model (Teori Force)* (1951, Barnes, 2004; Osborne & Brown, 2005; Carnal, 2007; Pugh, 2007; Uha, 2014; Ho, 2014) bahwa karena terjadi perubahan sebagai adanya pendorong kekuatan pendorong (*driving forces*) dan berubah untuk penolakan /keengganan (*resistance*) dengan berhadapan atau istilah lain kubu kutub dua untuk menggambarkan inovasi perubahan dalam *tradisional vs eksperimentalis* (Stewart-Weeks, 2015) atau *defender vs prospector dalam model Miles and Snow Strategic Gestalt* (Osborne & Brown, 2005: 139).

Suatu kelompok menurut Lewin (1951), baik itu kelompok sosial maupun organisasi maupun yang lebih luas yaitu masyarakat dalam kondisi tidak pernah "*a steady state of equilibrium*", tetapi berkelanjutan dalam proses selalu "*mutual adaptation*" yang disebut sebagai "*quasi-stationary equilibrium*". Melemahkan "*resistance to change*" atau memperkuat "*driving forces*" kondisi dua kemungkinan menghasilkan Perubahan tersebut.

Dari situlah Lewin untuk langkah-langkahnya selalu merumuskan perubahan dan mengelola dengan tiga tahap model yaitu: *freezing, moving dan unfreezing* yang oleh Pugh (2007) kemudian diimplementasikan dengan cara spesifik pelayanan dalam informasi. Pugh mengembangkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Unfreezing: getting the Organization Ready for Change

Ini tahap awal adalah kesadaran pentingnya tentang persuasi dan perubahan yang diperlukan, bagi perubahan organisasi harus disiapkan. Dengan dimulai langkah awal untuk kebutuhan harus mengenali dan berubah, supaya tercipta organisasi yang Sehat, persuasi, pihak-pihak yang bisa diidentifikasi serta bisa diajak untuk bekerja sama. Merupakan isu hal ini yang berpengaruh terhadap motivasi sekaligus perubahan proyek dari sebuah implementasi. *Unfreezing* adalah upaya proses dari bagian supaya orang meyakini nya tentang perubahan itu sangat perlu. Untuk memastikan organisasi harus

melengkapi untuk perubahan. Supaya organisasi berkelanjutan di dalam menentukan proses pengembangan maka tahap ini sangat diperlukan.

2. *Moving/changing: Putting Change Into Practice*

Yang memastikan proses aspek-aspek tersebut ,perubahan menjadikan bagian dari organisasi adalah:

- a. Informasi disebarluaskan (*Information of dissemination*)
- b. Proses perubahan dalam pengelolaan diri serta pemberdayaan (*The process of change in self-management and empowerment*)
- c. Perubahan sikap (*Attitude change*)

Argumennya adalah di dalam organisasi yang bekerja adalah orang-orang yang berperilaku secara defensif untuk mempertahankan control berdasarkan keinginan. Perilaku ini mempunyai aspek negatif terhadap organisasi sehingga organisasi menjadi defensif dan negatif. Sikap ini untuk belajar mengalami hambatan, dan juga hambatan bagi perubahan dan perluasan serta bagi inovasi yang efektif. Untuk merubah hal ini harus ada dorongan dari orang yang mau berfikir secara berbeda dan ada kemauan untuk belajar, apabila karakteristik yang dikembangkan di dalam organisasi maka bagi sistem komunikasi akan terbuka, kolaborasi, pemberdayaan, realism serta kejujuran di dalam mengurus organisasi, harus ada kemampuan termasuk di dalamnya untuk belajar supaya tidak terjadi kesalahan yang kemungkinan terjadi terutama atmosfir budaya.

- d. Perubahan struktural di dalam mendasari karakteristik (*Structural changes in underlying characteristics*)

3. Keseimbangan (refreezing), tetap bertahan untuk menjaga dari perubahan. Budaya organisasi akan berubah ketika kepercayaan dari orang-orang terhadap perubahan tersebut menjadi permanen. Refreezing step merupakan tahap akhir dari strategi manajemen perubahan dimana berkaitan dengan menyerap perubahan dan menjadikannya permanen (Pugh, 2007: 78). Di tahap akhir akan menjadikan permanen apabila terjadi inovasi OD terhadap penyerapan inovasi. Strategi manajemen perubahan terhadap proses-proses pada perubahan inovasi OD diharapkan perubahan kultur membawa iseminasi melalui informasi masyarakat, terutama bagi manajemen , penguatan dan pengembangan mandiri.

Konsep Inovasi di Sektor Publik

Inovasi didefinisikan sebagai "*an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual or another unit of adoption.*" (Rogers, 2003: 34). Apakah yang baru dapat dilihat terukur secara objektif dari kapan waktu ditemukannya atau digunakannya. Apabila suatu individu tampak terhadap suatu gagasan baru, organisasi, kelompok , maupun masyarakat luas maka itu adalah perubahan dalam inovasi. Albury, Mulgan dengan Rogers (2003: 3). Gagasan baru yang berhasil dan bukan hanya sekedar gagasan baru itu dinamakan inovasi. Berikut definisi inovasi yang dikemukakannya :

"innovation as 'new ideas that work'. To be more precise: "Successful innovation is the creation and implementation of new processes, products, services and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness or quality"

Inovasi dengan istilah "kreativitas" seringkali tertukar , karena inovasi merupakan ide-ide kreatif yang diterapkan dalam produk baru, proses ataupun bentuk jasa. Kreativitas didefinisikan Sementara sebagai suatu gagasan atau sebuah ide yang menciptakan perubahan dan mampu membawa aktifitas dalam sebuah kehidupan. Inovasi menghasilkan gabungan kreativitas dan pengetahuan (Dhewanto et al, 2014: 33-36).

Lebih lanjut dikatakan oleh Brown dan Osborne bahwa untuk sektor swasta, dikatakan bahwa inovasi tentang pengetahuan proses adopsi, merupakan salah satu bentuk dalam layanan / produk yang baru atau suatu proses dari produk baru dan pangsa pasar akan ditingkatkan serta digunakan untuk laba margin perusahaan. Layanan publik

Yang dibidangi oleh inovasi Sementara agak lebih kompleks, terutama dalam layanan publik khususnya dan Pelayanan organisasi publik (PSO), untuk membuat lebih kompleks tentang inovasi, sifatnya harus ada dorongan .

Brown dan Osborne menurutnya tentang inovasi merupakan studi literature yang secara luas dapat dibedakan menjadi empat dorongan utama yaitu :

1. dorongan riset (research push impetus), yaitu pengetahuan baru tentang pengembangan proses penelitian dan melalui pengembangan (seperti dalam industri farmasi).
2. tarikan pasar (market pull impetus), yaitu pengetahuan baru tentang pengembangan untuk keinginan konsumen/kebutuhan , melalui riset pasar biasanya.
3. Dorongan imperatif politik (political imperative impetus), yaitu layanan publik dalam konteks politik atau pelayanan organisasi publik (PSO).
4. Tuntutan produksi yang tinggi (conspicuous production impetus), yaitu upaya peningkatan sebagai inovasi yang diperlukan di dalam organisasi atau manajerial publik di dalam pelayanan.

Indikator Open Data

1. Terbuka secara default ketersediaan / dimungkinkan sehingga data bisa di akses secara keseluruhan dan diunduh didapat sebaiknya melalui internet (efisiensi). Juga data harus yang sesuai dalam bentuk dan tersedia untuk dimodifikasi.
2. Re-use and Redistribution: dengan syarat harus disediakan data kemungkinan bisa dipergunakan kembali dan termasuk mencampurkan serta redistribusi dengan dataset lainnya.
3. Universal Participation: Dapat menggunakan dan harus setiap orang mendistribusikan dan menggunakan kembali. Diskriminasi tidak boleh ada terhadap kelompok atau orang . Adanya pembatasan Tidak diperkenankan untuk tujuan-tujuan penggunaan atau tertentu untuk suatu bidang (misalnya hanya dalam bidang pendidikan).
4. Interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem untuk menunjukkannya dan dari berbagai organisasi supaya bisa bekerja sama (inter-operate). Artinya untuk beroperasi harus mempunyai kemampuan atau dataset yang berbeda bisa mencampurkannya.
5. Fokus pada data non-pribadi, yaitu informasi yang tidak mengandung data tentang individu tertentu. Demikian pula data pemerintah untuk beberapa jenis, keamanan nasional sebagai alasan adanya pembatasan

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif yang digunakan di dalam penelitian ini strategi memakai studi kasus, bahwa metode ini dengan pertimbangan karena sangat relevan strateginya untuk digunakan supaya holistic gambaran bisa didapatkan, akurat dan factual, apa yang menjadi fakta-fakta mengenai pelaksanaan *Open Data* (OD) yang menyebabkan tidak efektif di Kabupaten Bandung. Di lapangan tersebut dapat diperoleh Gambarnya dengan melalui wawancara mendalam, serta mengeksplorasi untuk observasi yang akan diteliti mengenai perilaku objek.

1. Obyek dan subyek Penelitian

Inovasi *Open Data* yang dijadikan obyek penelitian ini berdasarkan kerangka dalam UU tentang informasi masyarakat yang terbuka. Yang menjadikan unit analisisnya, yang diperhitungkan sebagai unit satuan yang menjadi subyek penelitian yaitu manusia berupa benda (Arikunto, 1996: 116-117), adalah unit utama Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dokumen Kegiatan OD yang dijadikan analisis untuk mendapatkan Informasi, pihak-pihak yang di wawancarai yang kompeten dengan subyek riset, objek-objek kajian didalam observasi, dan studi dokumentasi berkaitan terhadap ketentuan dengan layanan kegiatan OD dan Informasi masyarakat. Yang dilakukan adalah aktifitas mengumpulkan data yaitu:

- a. Data primer, diperoleh data melalui informan dengan wawancara mendalam dan cara observasi langsung.
- b. Data sekunder, yakni informasi atau data sebagai pendukung data yang berkaitan pada fokus penelitian. Data ini bisa berupa data statistik, dokumentasi, dan lain-lain.

Instrumen di dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi.

Data empirik untuk instrument yang digunakan untuk megambil data adalah informasi masyarakat sebagai aktifitas pelayanan di Pemerintah daerah Kabupaten bandung , dan *Open Data* didalam tampilan observasi, yang mana dipublikasikan mengenai data Kabupaten bandung.

2. Wawancara

Dilakukanya Instrumen ini untuk mengetahui keterangan dari informan berkaitan kurang terungkapnya atau data yang tida ada di dalam dokumen sebagai hasil dari observasi. Berbagai cara dilakukan di dalam wawancara yaitu lewat telepon, berhadap hadapan, atau dan melalui internet email serta media sosial yang lainnya yaitu Zoom dan WhatsApp. Diperlukannya Wawancara jarak jauh dikarenakan ada beberapa kelompok masyarakat pengguna OD dan pemerhati yang berada atau berkedudukan di luar kabupaten Bandung. Masyarakat yang berada di luar Kabupaten bandung harus sangat menunjang di dalam pengumpulan data melalui wawancara ini karena wilayah Kabupaten bandung sangat luas terdiri dari 33 Kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Tabel :1 Kebutuhan Data, Sumber Data, dan Jenis Data

No	Jenis Data	Sumber Data	Kebutuhan Data
A. Proses Adaptasi dan Difusi (Unfreezing) Open Data (OD) dan Layanan Informasi Publik (LIP)			
1	Primer	Di jajaran PPID dilaksanakan wawancara terutama dengan Pemda Kabupaten Bandung (bidang Diseminasi Informasi), serta Statistika dan bidang data.	pengenalan proses introduksi dan LIP serta penyadaran OD bagi internal organisasi (melalui pelatihan dan sosialisasi), dan eksternal organisasi (sosialisasi kepada publik)
	Sekunder	Kegiatan laporan dokumen lokakarya dan/atau sosialisasi, dan/atau bagi jajaran dilasanakan pelatihan untuk Manajer/Pimpinan	
2	Primer	Di jajaran PPID dilaksanakan wawancara terutama dengan Pemda Kabupaten Bandung (bidang Diseminasi - Informasi) dan bidang Data dan statistika	Adaptasi (komunikasi. Manajerial dan persiapan organisasi secara stuktural)
	Sekunder	Kegiatan sosialisasi dokumen Laporam dan/atau pelatihan , dan/atau lokakarya bagi jajaran LIP dan staf OD	
B. Implementasi Inovasi OD			
1	Primer	Di jajaran PPID dilaksanakan wawancara terutama Pemda Kabupaten Bandung bidang statistika , bidang data dan (bidang Diseminasi Informasi)	LIP ,struktur pelaksana OD dan Struktur Organisasai PPID aspek konfigurasi desentralisasi atau sentralisasi) unit kerja dari pembagian struktur aspek termasuk tanggung jawab ,tupoksi dalam bekerja , baik secara horizontal maupun vertical .Secarakualitas dan kuantitas / kompetensinya (baik itu staf, manajer, pimpinan maupun otoritas.
	Sekunder	Kepwal dan Perwal kabupaten Bandung berkaitan dengan KIP dan OD	
2	Primer	Di jajaran PPID dilaksanakan Wawancara terutama Pemda Kabupaten Bandung	Kebijakan tentang penunjukan dan penyediaan SDM yang

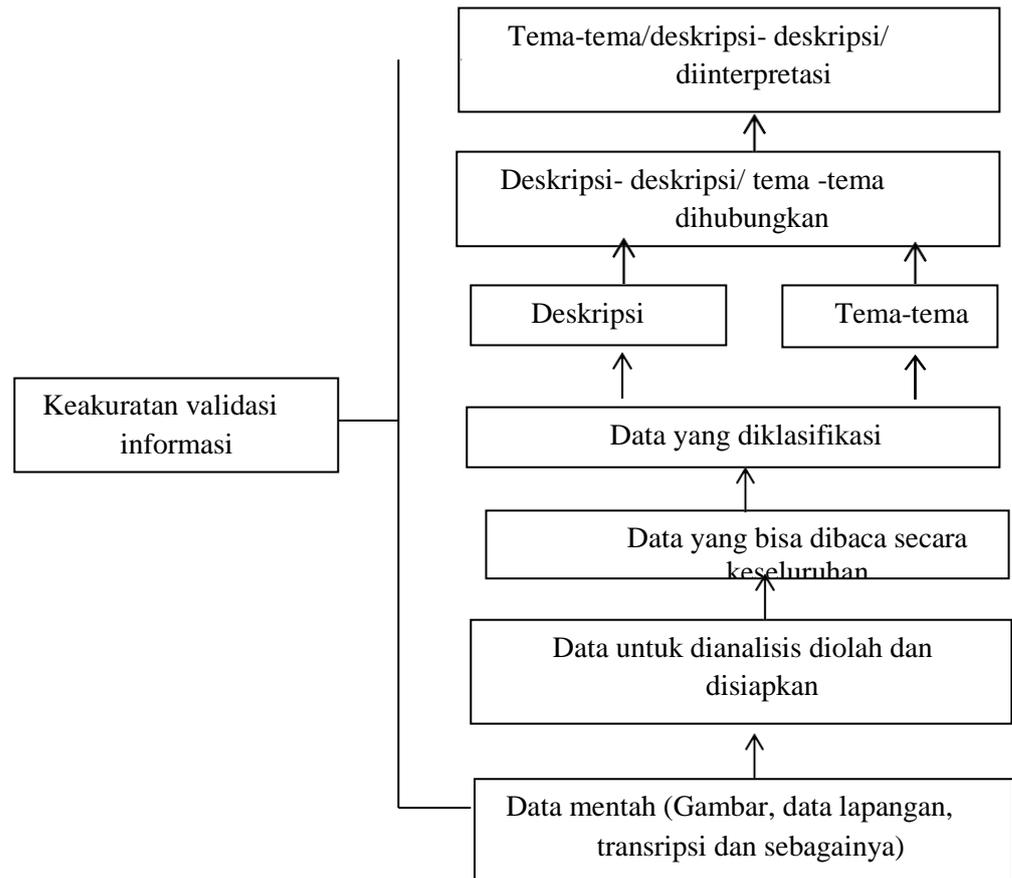
No	Jenis Data	Sumber Data	Kebutuhan Data
		(bidang Diseminasi Informasi) serta statistika dan bidang Data .Observasi OD, prasarana KIP dan sarana (teknologi informasi, aplikasi program, perlengkapannya sesuai SLIP, meja informasi).	memadai secara kualitas dan kuantitas) ,prasarana, penyediaan sarana,LIP , operasional prosedur standar OD.
	Sekunder	SK, Kepwal dan Perwal	
3	Primer	Di jajaran PPID dilaksanakan wawancara terutama Pemda Kabupaten Bandung, bidang Data, bidang statistika dan bidang diseminasi Informasi)	Implementasi proses OD dan LIP dalam peran Staf dan manager /PPID)
4	Primer	Di jajaran PPID dialaksanakan wawancara Terutama Pemda Kabupaten Bandung (bidang statistika , bidang data dan bidang Disemiasi Informasi) . Observasi tampilan OD ,Komunitas Code for Bandung dan wawancara dengan DSI	Proses tahapan inovasi OD, penyajian informasi publik berkala, mengumumkan hasil analisis , mempublikasikan, proses membuat virsual,proses membuka data , dan proses membangun aplikasi berdsarkan ketentuan UU KIP
	Sekunder	Pedoman LIP dan SOP OD	
C.Tahap Refreezing (Tahap Absorbsi dan Kestabilan atau permanen beroperasinya OD dan LIP)			
1	Primer	Di jajaran PPID dilaksanakan wawancara Terutama Pemda Kabupaten Bandung , Statistika, dan bidang Data , dan bidang Diseminasi Informasi. Wawancara dengan Komunitas Code for dan DSI Bandung	Struktur perubahan organisasi
	Sekunder	LIP dan Pedoman/SOP OD. Resi situ PPID Pemda Kabupaten Bandung.	
2	Primer	Di internal organisasi dilaksanakan wawancara , OD Diskominfo Kabupaten Bandung, staf ahli dan jajarannya dan staf PPID beserta Manager). Organisasi eksternal atau pengamat/pengguna publik, organisasi eksternal dan Pedasi (Code Komunitas for Bandung dan DSI)	Terdapat Perubahan sikap (sharing , learning, collaborating)
	Sekunder	Perki 1/2020 layanan Standar tentang Informasi Publik (SLIP), pelaporan KI Monev Jabar, LIP dalam pelaporan tahunan Pemda Kabupaten Bandung	

No	Jenis Data	Sumber Data	Kebutuhan Data
3	Primer	Di jajaran PPID dilaksanakan wawancara Terutama Pemda Kabupaten Bandung , Statistika, dan bidang Data , dan bidang Diseminasi Informasi. Wawancara dengan Komunitas Code for dan DSI Bandung	Data yang dikumpulkan
	Sekunder	Observasi konten data Kabupaten Bnadung	
4	Primer	Di jajaran PPID dilaksanakan wawancara Terutama Pemda Kabupaten Bandung , Statistika, dan bidang Data , dan bidang Diseminasi Informasi. Wawancara dengan Komunitas Code for dan DSI Bandung. Dengan konten medsos dilaksakan observasi dengan Pemda Kabupaten Bandung.	Informasi Diseminasi
	Sekunder	Di jajaran PPID dilaksanakan wawancara Terutama Pemda Kabupaten Bandung , Statistika, dan bidang Data , dan bidang Diseminasi Informasi. Wawancara dengan Komunitas Code for dan DSI Bandung	
5	Primer	Di jajaran PPID dilaksanakan wawancara Terutama Pemda Kabupaten Bandung , Statistika, dan bidang Data , dan bidang Diseminasi Informasi. Wawancara dengan Komunitas Code for dan DSI Bandung	Open Data melibatkan pengguna nya.
	Sekunder	Melaporkan program kegiatan Open Data	

3. Analisis Data, Validitas dan Reliabilitas

Data kualitatif dalam analisis ini merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan, pelaporan dan interpretasi yang secara simultan dilakukan, semuanya merupakan suatu proses karena dilaksanakan secara berkelanjutan, yang sangat membutuhkan terus menerus refleksi terhadap data yang kesemuanya itu dihasilkan dari semua pertanyaan-pertanyaan riset yang dijadikan data analisis. Misalnya pada saat kegiatan ketikan observasi dan awawancara berlangsung, Lalu peneliti sambil dapat melakukan analisis , menulis catatan-catatan kecil /singkat kemudian juga dapat membuat laporan akhir yang dijadikan materi narasi.

Aspek yang dilakukan terhadap analisis tertentu, atau khususnya terhadap kasis (embedded) yaitu implementasi aspek dan inovasi difusi dalam inivasi manajemen. Ini adalah tahapan-tahapan terhadap gambaran data yang dijadikan analisis.



Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: diadaptasi dari Creswell, 2013

Data di dalam analisis ini di dalam pengumpulan datanya melibatkan serta mempertanggung jawabkan reliabilitas dan validitas. Keabsahan atau validitas dalam konteks data pendekatan kualitatif adalah akurasi pemeriksaan dari hasil penelitian dengan strategi-strategi yang menerapkan hasil tertentu. Data yang dikumpulkan melibatkan dan harus dipertanggungjawabkan reliabilitas dan validitas tertentu. Untuk reliabilitas sementara dimaksudkan adalah dapat dipercaya atau keajegan, kekonsistenan serta kehandalan. Dijelaskan juga bahwa Reliabilitas merupakan hasil penelitian yang dapat digunakan atau ditransfer pada konteks lain, dapat diulangi lagi dari hasil penelitian (*confirmability, dependability, transferability dan credibility*) yang dilakukan strategi-strategi untuk memastikan kehandalan dan keabsahan data adalah data triangulasi yang digunakan yaitu konsistensi memeriksa data dari sumber yang berbeda, yaitu lintas-periksa dibandingkan atas informasi yang konsisten yang diperoleh yang berbeda waktunya dan yang berbeda caranya dengan metode dalam kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah disebutkan di pendahuluan bahwa program OD merupakan bagian dari perwujudan amanah UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal ini ditegaskan pula dalam *Roadmap* OD Kota Bandung. Oleh karena itu manajemen OD dan KIP harus bersinergi. Proses sinergi inilah yang diharapkan dapat ditemukan dalam penelitian ini.

Sebagai gambaran awal bagaimana keduanya bersinergi dapat ditelusuri dari indikator dan manajemennya.

Tabel :2 Indikator OD dan KIP

Indikator KIP	Indikator OD
<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi masyarakat harus bersifat terbuka dan bisa diakses oleh Pengguna publik. Badan dari Publik harus memiliki situs resmi serta wajib untuk mengumumkannya . informasi tersebut secara berkala melalui <i>website</i>. 2. Informasi masyarakat yang bersifat rahasia harus dikecualikan, terbatas 3. Dan ketat. (yang membahayakan bagi negara, berkaitan sekali dengan perlindungan unutup kepentingan usaha dari usaha persaingan yang tidak sehat, kaitannya dengan hak-hak pribadi, berkaitan sekali dengan jabatan yang dirahasiakan dan / atau yang belum diminta diminta dan dikuasai serta didokumentasikan) 4. PPID yang dimiliki Badan Publik. 5. Informasi masyarakat yang SOP layanan dimiliki Badan publik. 6. Daftar Informasi Publik (DIP) harus dimiliki Badan Publik. 7. Informasi masyarakat harus setiap saat oleh pemohon dapat diperoleh dan pemohon menginginkan dengan cepat, dan waktu yang tepat , ringan biayanya dan sederhana caranya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara <i>default</i> harus terbuka ,terbuka yang memungkinkan akses data tersedia secara keseluruhan dan bisa diunduh dengan baik dengan sistem internet (efisiensi). Tersedia datajuga diharuskan dalam bentuk yang sudah dimodifikasi dan disesuaikan. 2. <i>Re-use and Redistribution</i> dengan syarat data harus disediakan yang penggunaannya memungkinkan Kembali dan bisa redistribusi dengan dataset termasuk mencampurkannya. 3. <i>Universal Participation</i> harus digunakan Kembali dan dapat digunakan oleh setiap orang dan bisa untuk didistribusikan , diskriminasi tidak diperbolehkan, terhadap kelompok maupun perseorangan. Pembatasan bagi pengguna tidak diperkenankan adanya untuk melaksanakan tujuan-tujuan atau pada bidang tertentu saja (misalnya pada bidang Pendidikan), <i>Interoperabilitas</i> yaitu kemampuan menunjukkan dari system dan dari berbagai organisasi untuk Bersama bekerja (inter-operate). Artinya yaitu beroperasi sampai sejauh mana kemampuan atau dataset yang berbeda bisa dicampurkan. 4. Data non-pribadi di fokuskan yaitu tidak ada data non-pribadi yang focus serta informasi tertentu yang mengandung data individu. Demikian pula data pemerintah dari beberpa jenis data, harus ada pembatasan karena alasan tertentu unuk keamanan dan kesetabilan Nasional.

Sumber: Diolah dari Pedoman OD dan UU KIP

Kesimpulkannya yang didapat dari table tersebut bahwa KIP dan OD mempunyai kesamaan, yaitu: *Access and Availability* (Akses dan ketersediaan) yang efisien dan informasi harus diperhatikan kecuali yang dikecualikan. Adapun perbedaannya adalah KIP

format tidak disyaratkan untuk data *re-use and redistribution*, sedangkan dalam OD uji konsekuensi data untuk klasifikasi tidak ada ketentuan.

Konsep konsep yang dijadikan dasar dan regulasi adanya perbedaan keduanya di dalam manajemen, misalnya prosedurnya ,teknologi ,SDM dan struktur organisasi. Untuk prosedur OD terdiri dari : membuat visualisasi, membuka data , membangun aplikasi dan menganalisis publikasi dengan menggunakan data publik. Untuk sementara Prosedur KIP , standart layanan berdasarkan informasi dari publik terdiri atas :informasi pengklasifikasian informasi, penyusunan informasi daftar public (DIP), dilakukannya uji konsekuensi, diumumkannya informasi tersebut kepada masyarakat (didasarkan klasifikasinya).Dan untuk permohonan informasi tetap dilayani serta harus diutamakan . Pemerintahan kabupaten Bandung diprioritaskan karena salah satunya atau merupakan Pemerintah Daerah di Indonesia yang menjadi contoh untuk project didalam pelaksanaan *Open Data* setelah kota Bandung

SIMPULAN

Kerangka kerja teoritis yang digunakan sebagai model di dalam penelitian ini yaitu teori dari Bryson dkk sebagai landasan teorinya. Hasilnya adalah menguatkan model tersebut terhadap kerangka kerja yang merupakan paling tepat untuk organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bandung beserta jaringan mitra kerjanya, dan dioptimalkan yang dapat diharapkan untuk pencapaian sasaran SPM, target dan tujuannya.

Administrasi Publik sebagai *major science* di dalam penelitian ini, dan *minor science* yaitu ilmu kesejahteraan social. Terdapat irisan diantara keduanya yaitu manajemen sebagai bagiannya dari tata kelola kolaboratif di bidang administrasi publik , dimana yang menjadi alat di dalam pendekatan ini merupakan usaha untuk meningkatkan nilai publik di dalam mencari solusi untuk menangani masalah masalah yang kompleks dan di dalam berbagai bidang harus dinamis terutama di bernagai bidang pemerintah termasuk kesejahteraan social yang menjadi bidangnya serta bertujuan untuk supaya sejahtera di bidang sosial serta diciptakan kesejahteraan terutama individu. Keluarga dan masyarakat yang merupakan bidang untuk membantu kesejahteraan social serta mengelola dari berbagai sumberdaya di dalam mencapai kondisi dan mempercepat masyarakat sejahtera.

Berdasarkan data empirik lapangan yang meliputi hasil penelitian dan temuan hasil penelitian yang di dijadikan konsep baru, dengan kerangka teori utama yang digunakan yaitu dari Bryson dkk.

Bahasan dan Hasil riset tentang Strategi Manajemen Perubahan dalam Inovasi *Open Data* ini dikaitkan dengan masalah yang akan dipecahkan supaya menerapkan inovasi ini agar bisa berjalan secara efektif dan efisien dalam tataran secara praktis dan teoritis. Maka dari itu disarankan serta diarahkan untuk memecahkan permasalahan tersebut yang didasarkan pada dua tataran

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bryson, J. M., Patton, M. Q., & Bowman, R. A. (2011). Working with evaluation stakeholders: A rationale, step-wise approach and toolkit. *Evaluation and Program Planning*, 34(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2010.07.001>
- Crosby, B. C., & Bryson, J. M. (2010). Integrative leadership and the creation and maintenance of cross-sector collaborations. *Leadership Quarterly*, 21(2), 211–230. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.01.003>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Grudinschi, D. (2014). *STRATEGIC MANAGEMENT OF VALUE NETWORKS: how to create value in cross-sector collaboration and partnerships*.

- Scott, T. A., & Thomas, C. W. (2016). Unpacking the Collaborative Toolbox : Why and When Do Public Managers Choose Collaborative Governance Strategies ?, *00(00)*, 1–24.
- Vangen, S. (2013). Vangen S. and Huxham, C. (2013). Building and Using the Theory of Collaborative Advantage. In *Network Theory in the Public Sector: Building New Theoretical Frameworks* . Eds. R., Keast, M., Mandell and R. Agranoff. New York: Taylor and Francis, Forthcoming, 1–26.
- Woodland, R. H., & Hutton, M. S. (2012). Evaluating Organizational Collaborations: Suggested Entry Points and Strategies. *American Journal of Evaluation*, *33(3)*, 366–383. <https://doi.org/10.1177/1098214012440028>
- Zeckhauser, J. D. D. and R. J. (2011). *Collaborative governance : private roles for public goals in turbulent times*. Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540.